



BERDALIH TERENDAH SE-DIY Dewan Minta Uang Saku Kunker Ditambah

YOGYA (KR) - Jatah uang saku kunjungan kerja (kunker) DPRD Kota Yogya dinilai merupakan yang paling rendah jika dibandingkan kabupaten lain di DIY. Kalangan dewan pun meminta alokasi uang saku ditambah dengan menyesuaikan standar serta kemampuan keuangan daerah.

Usulan penambahan jatah uang saku kunker itu diajukan dalam rapat terbatas antara Pimpinan DPRD Kota Yogya dengan Sekda serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya, Selasa (7/3) kemarin. "Harapan kami hanya menyesuaikan angkanya dengan kabupaten lain. Apalagi Kota Yogya ini merupakan ibu kota provinsi," tandas Ketua DPRD Kota Yogya Sujanarko.

Pada awal 2016 lalu, jatah uang saku kunker dewan mencapai Rp

500.000 perhari. Kemudian pada triwulan ketiga dinaikkan dua kali lipat menjadi Rp 1 juta perhari. Sedangkan usulan penambahan yang diajukan tahun ini menjadi Rp 1,7 juta perhari.

Sujanarko menambahkan, kendati ada usulan penambahan jatah uang saku kunker, namun bukan berarti pagu anggaran yang sudah dialokasikan bertambah. Melainkan hanya dengan melakukan rasionalisasi beberapa komponen kunker seperti mengurangi jatah uang

makan atau transportasi lokal.

"Dari sisi pagu anggaran tidak berubah, hanya komponennya saja yang diubah. Usulan ini pun sama dengan Kabupaten Sleman serta masih lebih rendah dari provinsi yang mencapai Rp 1,75 juta perhari," tandasnya.

Sementara pagu anggaran untuk membiayai agenda kunker serta kegiatan kedewanan lainnya mencapai Rp 26,8 miliar. Di antaranya meliputi perjalanan dinas tiap komisi, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Pembuat Peraturan Daerah, Badan Kehormatan, panitia khusus, bimbingan teknis, reses, pertemuan Asosiasi DPRD Seluruh Indonesia (Adeksi), serta fungsi pendampingan pejabat eksekutif.

Kepala BPKAD Kota Yogya Kadri Renggono mengaku akan mengkaji lebih dulu usulan tersebut. Menurutnya, usulan bisa diakomodir asalkan tidak mengubah pagu anggaran dan sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Standar Harga barang dan Jasa (SHBJ).

Kadri mengaku, jika disepakati maka sumber dana untuk mengakomodir usulan dewan tersebut kemungkinan besar akan diambilkan dari pengurangan biaya penginapan hotel.

"Tapi ini masih akan dipelajari dulu karena sudah ada Perwal 110/2016 yang mengatur SHBJ, dan di dalamnya juga ada pengaturan komponen uang saku dan hotel," jelasnya. (Dhi)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005